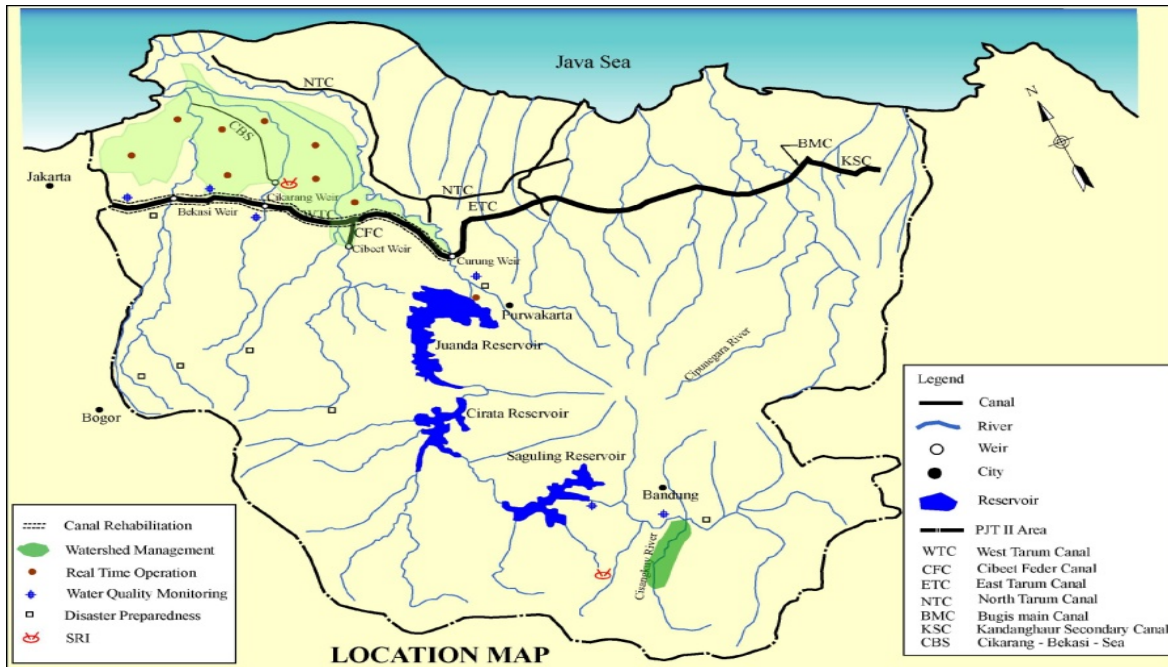


### Citarum dan Pinjaman ADB (Citarum and ADB Loan)

Updated by Ratna Yunita<sup>1</sup>



#### Bahasa

#### I. Citarum yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Citarum adalah sungai yang memiliki arti penting bagi kehidupan penduduk Jawa Barat yang berpenduduk kurang lebih 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduk menggunakan air dari aliran sungai Citarum untuk kegiatan sehari-harinya seperti keperluan pertanian, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Daerah aliran sungai (DAS) Citarum ini membentang 270 kilometer dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, hingga Pantai Utara Kabupaten Karawang dan Bekasi. Sungai ini merupakan sungai yang paling strategis di Indonesia, berhulu di kecamatan Kertasari (G. Wayang) Kab. Bandung, berhilir di Muara Kembong Kab. Kerawang Bekasi. Sungai juga merupakan sumber air untuk 3 bendungan besar yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur, yang menghasilkan kapasitas 1,400 mega watts listrik, sumber irigasi bagi 240.000 hektar sawah, pemasok 80% air baku untuk ibu kota Jakarta dan sumber penghidupan bagi 9 juta orang yang tinggal di DAS Citarum.

#### English

#### I. Citarum that controls people's livelihood

Citarum is a river that has a very significant meaning for life of approximately 35 million West Java inhabitants. Most of the people use the water of Citarum for their daily activities, such as farming, household needs, etc. Citarum's river basin 270 km lengths from Pengalengan in Bandung district until the north coast of Karawang and Bekasi district. Citarum is the most strategic river in Indonesia. It is upstreaming from Kertasari sub district (Wayang Mount) in Bandung District and downstreaming to Muara Kembong, Kerawang Bekasi District. This river is also source for three big dams, which are Saguling, Cirata and Jatiluhur. They produce 1,400 mega watts of electricity. Citarum is also the water source for 240.000 hectares of rice fields. It supplies 80% of clean water for Jakarta and supports the livelihood of 9 million peoples who live in Citarum's river basin.

## II. Citarum dan masalahnya

Namun tingginya populasi telah menyebabkan Citarum mengalami tingkat pencemaran yang sangat tinggi sampai saat ini. Tahun 2003, Kompas mencatat 217 industri yang beroperasi di sepanjang DAS membuang 1320 liter per detik atau setara dengan 270 ton per hari limbah ke badan sungai tanpa menggunakan instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Kebanyakan industri belum mematuhi ketentuan AMDAL sebagai bentuk kewajiban formal menjaga kelestarian lingkungan. Subdinas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung mencatat bahwa volume sampah yang mencemari anak sungai tersebut sekitar 70%, kemudian industri 16%, pertanian 2 % dan sisanya adalah peternakan. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLHD) Jawa Barat pada tahun 2007, status mutu air Citarum berada pada indeks pencemaran "D" yang berarti tercemar berat.

Selain itu permasalahan sedimentasi yang terjadi sangat memprihatinkan, sehingga sering menimbulkan persoalan banjir di daerah aliran sungai di hilirnya dan daya tampung air yang terus menurun dari tahun ke tahun. Lebar Sungai Citarum yang semula rata-rata 50 hingga 60 meteran, kini rata-rata hanya tersisa 30 sampai 40 meteran saja. Kedalamannya pun paling tiga sampai lima meteran, padahal sebelumnya mencapai 10 meteran.

Kenyataan tersebut di atas membawa masyarakat di sekitar DAS Citarum pada kondisi kekurangan air 5,5 miliar m<sup>3</sup>/tahun, karena kebutuhan masyarakat hanya terpenuhi 21% atau 1,5 miliar m<sup>3</sup>/tahun. Ini menunjukkan potensi air di DAS Citarum hilang 86% atau 9,5 miliar m<sup>3</sup>/tahun (PR, 2003).

## III. Citarum dan Tawaran ADB

Untuk mengatasi bahaya "eco-terrorism" (istilah yang digunakan oleh Yasraf Amir

## II. Citarum and its problems

The high density of population along Citarum's river basin has caused severe pollution to the river. In 2003, Kompas recorded 217 industries operated along the Citarum's river basin discarded 1320 liter per second or equal with 270 tons per day of industrial waste to the river without using proper waste water management installation. Many factories have not met the Environmental Impact Analysis (AMDAL) as the formal obligation to maintain environment conservation. The office for Environment Pollution Control of Bandung District recorded that 70% of pollution came from garbage, 16% from industrial wastes, 2% from agriculture wastes, and the rest came from poultry. Based on the study conducted by Environment Control Body of West Java (BPLHD), in 2007, the quality of Citarum's water has reached "D" level of pollution index. It means the river has severely polluted.

Besides, the sedimentation problems have also become very concerning. It has caused flood in the downstream area and the river retain capacity has been decreasing each year. The width of Citarum River was 50-60 meters, and currently it is only 30-40 meters width. The depth of the river is also decreasing from 10 meters depth and now only 3-5 meters.

That fact has brought people in Citarum's river basin to the condition of 5,5 billion m<sup>3</sup>/year water deficits. The river could only supply 21% or 1,5 billion m<sup>3</sup>/year. That means, the water potentially decreases 86% or 9, 5 billion m<sup>3</sup>/year (Pikiran Rakyat, 2003).

## III. Citarum and ADB's offer

To deal with the "eco-terrorism" threat (term used by Yasraf Amir Piliang for environment

Piliang untuk perilaku merusak ekosistem lingkungan hidup), pemerintah Indonesia menyatakan bahwa akan melakukan pembenahan dengan **dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia yang berjumlah US\$ 500 juta**. Adanya upaya membenahi Sungai Citarum dengan 70 kegiatan yang digagas oleh ADB melalui skema utang 15 tahun. ADB merupakan International Financial Institutions yang sangat besar pengaruhnya dan banyak kegiatan di Indonesia.

Jumlah tersebut akan diberikan dalam empat tahap, dengan memakai skema pembiayaan ADB yang baru yang dinamakan *Multi-Tranche Financing Facility (MFF)* dimana pinjaman akan terbagi dalam 4 tahap yaitu:

- Tranche 1 : Tahun 2007 - 2011 (diperkirakan pelaksanaannya mundur)
- Tranche 2 : Tahun 2009 - 2015
- Tranche 3 : Tahun 2013 - 2017
- Tranche 4 : Tahun 2017 - 2021

Tahap pertama berjumlah **US\$ 60 juta** yang berasal dari OCR (Ordinary Capital Resources) dan ADF (Asian Development Fund). Menurut Direktur Irigasi dan Sumber Daya Air Bappenas, tahun ini adalah tahun terakhir Indonesia mendapatkan ADF sehingga pemerintah mengambil kesempatan tersebut dalam upaya rehabilitasi DAS Citarum. ADF merupakan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Sebelum masuk dalam pinjaman proyek, pada tahap persiapan, ADB sudah memberikan empat kali Bantuan Teknis untuk proyek ini sejumlah US\$ 2,18 juta.

Skema MFF ini dijelaskan oleh ADB dengan menggunakan analogi Kartu Kredit, dimana jumlah US\$ 500 juta merupakan batas limit pinjaman. Sementara untuk jumlah pemakaian diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menentukan dan jika ternyata di tengah periode pelaksanaan MFF, pemerintah Indonesia tidak memerlukan bantuan Kartu Kredit tersebut lagi, maka pinjaman dapat dihentikan. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme

destructive behavior), the Government of Indonesia announced that they will conduct Citarum's rehabilitation using the Asian Development Bank (ADB) loan amounted to US\$ 500 million. There are 70 activities proposed by the ADB through 15 years loan scheme to recover the Citarum River. ADB is an International Financial Institution that has very big influence and has many projects in Indonesia.

The loan will be disbursed in four tranches, using ADB's new financing scheme, Multi-Tranche Financing Facility (MFF). Those tranches are scheduled as follows:

- Tranche 1: 2007 until 2011 (the implementation is predicted to be postponed)
- Tranche 2: 2009 until 2015
- Tranche 3: 2013 until 2017
- Tranche 4: 2017 until 2021

The first tranche amounted to **US\$ 60 million** is coming from Ordinary Capital Resources (OCR) and Asian Development Fund (ADF). According to Director of Irrigation and Water Resources of National Development Planning Board (Bappenas), this year will be the last year for Indonesia to receive ADF; therefore the government will take the opportunity in order to rehabilitate the Citarum's river basin. ADF is a low interest loan. Before the project loan is implemented, ADB has given four technical assistants amounted to US\$2, 18 million.

ADB is using a credit card analogy to describe the MFF scheme, where the US\$500 is the credit limit. The government of Indonesia has the authority to decide how much they will use the credit, and if in the middle of MFF implementation the government of Indonesia feels that they do not need the credit card anymore, the loan could be stopped. Then the next question is how compensation mechanism of the loan closure is, what if the project involving third parties (private sector), will they

kompensasi penghentian pinjaman tersebut, bagaimana jika dalam pelaksanaan proyek melibatkan pihak ketiga (privat), apakah mereka juga dapat menanggung konsekuensi pemutusan pinjaman tersebut. Hal tersebut masih menjadi tanda tanya.

Proyek ICWRMP ini merupakan proyek multi sektor sehingga melibatkan banyak kepentingan dalam pengelolaan. Jika dilihat dari struktur yang ada di bawah ini, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum, Departemen Pekerjaan Umum merupakan pelaksana proyek di bawah koordinasi Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional).

#### **IV. Citarum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Beberapa LSM diantaranya adalah KruHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air), Debtwatch Indonesia, Elaw Indonesia, Perkumpulan Boemi, IESR dan BIGs melakukan monitoring proyek ADB yang disebut dengan ICWRM (Integrated Citarum Water Resource Management) dengan melakukan studi dokumen ADB dan kunjungan lapangan ke wilayah Tarum Kanal Barat. Berdasarkan studi dokumen ditemukan bahwa ADB telah melanggar kebijakannya sendiri, terkait dengan isu transparansi dalam bentuk ketersediaan dokumen proyek dan proses konsultasi publik yang harus terpenuhi sebelum proyek disetujui.

##### **a. Studi Dokumen**

Menurut Kebijakan Komunikasi Publik ADB, dokumen-dokumen penting berkaitan dengan persiapan implementasi sebuah proyek, harus tersedia untuk publik dan dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat yang berpotensi terkena dampak proyek, sebelum proyek tersebut disetujui. Dokumen yang dimaksud adalah laporan Bantuan Teknis (TA), dokumen AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dan Rencana Penggusuran (\*Resettlement Plan\*). Namun pada kenyataannya:

- o Laporan Bantuan Teknis (TA) tersedia hanya dalam bahasa Inggris dan ADB

also bear the consequences of the loan closure. These questions are still unanswered.

The ICWRMP project is a multi-sectors project that involving many stakeholders in its implementation. If we refer to the structure below, *Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum*, the Department of Public Works is the executor of the project under Bappenas coordination.

#### **IV. Citarum and Non-governmental Organizations (NGOs)**

Some NGOs such as KruHA (People Coalition for Rights to Water), Debtwatch Indonesia, Elaw Indonesia, Perkumpulan Boemi, IESR and BIGs had conducted a monitoring towards ADB's project on Citarum which is so called Integrated Citarum Water Resource Management (ICWRM) by studying the ADB's documents and field visit to West Tarum Canal area. Based on the document study, it was found that the ADB has violated its own policies, in terms of transparency issue regarding the availability of the project documents and public consultation process that need to be fulfilled before the project being approved.

##### **a. Document Study**

According to ADB's Public Communication Policy, the important documents related to preparation of a project implementation, must be available for public and in the language that is understood by people who are potentially affected. It also must be published before the project being agreed. The intended documents are the report of Technical Assistant, the Environmental Impact Assessment document, and the Resettlement Plan. The facts are:

- The Technical Assistant is only available in English and ADB said that they are not obligated to provide the report in

- menyampaikan bahwa mereka tidak wajib diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- o Dokumen AMDAL yang menyeluruh. Berdasarkan dokumen proyek yang tersedia di situs ADB, laporan yang tersedia hanya laporan awal mengenai Analisa Lingkungan yang dibuat oleh sebuah perusahaan konsultan Jepang. Selain itu ADB hanya akan membuat terjemahan dalam bentuk ringkasan beberapa dokumen pilihan terkait dengan AMDAL ini.
  - o Rencana Penggusuran. Sampai dengan 22 Juli 2008, dokumen Rencana Penggusuran belum tersedia. Padahal, dokumen ini seharusnya sudah tersedia **sebelum penilaian proyek yang jatuh pada tanggal 4-8 Agustus 2008**. Dokumen Rancangan harus tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak proyek dan mereka dilibatkan dalam proses pembuatan rancangan tersebut. Lagi-lagi, ADB hanya akan menyediakan informasi terkait dengan Rencana Penggusuran dalam bentuk booklet saja.

LSM yang melakukan monitoring ini menuntut tersedia semua dokumen tersebut di atas sebelum proses persetujuan proyek dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara menyeluruh bukan hanya sebagian kecil saja. Hal ini sangat diperlukan agar membuka kemungkinan partisipasi yang murni dari masyarakat sebelum proyek dilanjutkan. Mengingat, transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara luas merupakan hal penting sebagai social control dalam meminimalisasi resiko.

**b. Expert Meeting dan Strategic Planning di Bandung**

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam, maka pada tanggal 8-9 Juli 2008, LSM yang disebutkan

Bahasa Indonesia

- The complete Environmental Impact Analysis document. Based on the documents posted in ADB's website, there is only a preliminary report of the environment assessment made by the Japanese Consultant. Furthermore, ADB will only provide translation of the summary of selected documents related to environmental impact assessment.
- Resettlement Plan. Until 22 July 2008, the draft of resettlement plan has not been available. Despite the fact that the document should be available before **the project appraisal that is planning to be conducted on August 4-8, 2008**. The draft should be available in the language understood by the people who are potentially affected and the people must be involved in resettlement plan process. Still, the ADB will only provide brief information related with the resettlement plan in the form of booklet.

NGOs, that monitor the project, demand the availability of all documents mentioned above before the approval process, and the entire documents must be translated into Bahasa Indonesia, not just the summary. The documents are very important in order to boost public participation before the project is being proceeded, since transparency, accountability and public participation are the important aspects in social control in order to minimize the risks.

**b. Expert Meeting and Strategic Planning in Bandung**

To acquire more complete and deeper data, the NGOs mentioned above had initiated a meeting with Citarum stakeholders on 8-9

di atas menginisiasi pertemuan dengan para stakeholder Citarum di Bandung. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak BBWS, PU, BPLHD, LSM lokal dan pemerintah daerah setempat. Sangat disayangkan Bappenas yang pada awalnya berencana untuk hadir, namun akhirnya tidak dapat hadir. Beberapa hal yang dihasilkan dari pertemuan di hari pertama antara lain:

- Pendekatan proyek dinilai struktural, sehingga keterlibatan masyarakat sangat minim.
- Tidak jelasnya mekanisme penyampaian keluhan secara terbuka.
- Proses sosialisasi yang tidak merata sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Selain itu proses Konsultasi Publik yang menjadi kewajiban ADB dan pemerintah Indonesia tidak diketahui oleh peserta pertemuan.
- Proyek ICWRM merupakan proyek multi-stakeholder dan multi sektor sehingga sangat rentan terhadap konflik kepentingan antara pusat dan daerah atau bahkan di internal daerah sendiri.
- Mekanisme transparansi dalam hal informasi dari pihak ADB dan pemerintah Indonesia masih tidak belum dimengerti oleh masyarakat.
- Mekanisme pinjaman ke ADB perlu diklarifikasi lagi kepada Bappenas.

Di hari kedua, beberapa NGO lokal beserta inisiator bertemu kembali merumuskan bentuk kerja sama dalam rangka memperluas jaringan terkait informasi dan gerakan bersama dalam advokasi proyek ICWRM ini. Pada hari yang sama terjadi kesepakatan untuk menamai kelompok ini **ARUM (Aliansi Rakyat Untuk Citarum)** untuk kepentingan proses lobby and advokasi ke depan.

#### **c. Pertemuan dengan Bappenas dan**

July 2008 in Bandung. The meeting was attended by BBWS, Department of Public Works, BPLHD, local NGOs and local government. Unfortunately, the representative of Bappenas did not come. There were several points agreed on the first day, which are:

- ICWRM Project approach is considered structural, therefore public participation is very minimum
- Open complaint mechanism is not clear
- Socialization process is inequitable, thus, many people do not know which institution responsible for the project implementation. Moreover, the meeting participants did not know the Public Consultation process, which has been the ADB's and GoI's responsibility.
- ICWRM project is multi-stakeholders and multi-sectors project therefore it is very vulnerable for conflict of interest between central and local government or perhaps within internal region institution.
- Transparency in terms of information disclosure mekanisme of ADB and Indonesia government is still not clear enough for some participants.
- Bappenas should clarify the reason to obtain loan for rehabilitating Citarum.

On the second day, some of the local NGOs along with the initiators of the meeting met to formulate form of cooperation in order to expand the network and joint movement as the form of advocacy. There was also an agreement to name the group as **ARUM (People Alliance for Citarum)** for the lobby and advocacy purposes.

#### **c. Meeting with Bappenas and Department**

**Departemen Pekerjaan Umum**

Selain beberapa upaya tersebut di atas, KruHA dan LSM lainnya juga melakukan pertemuan dengan PU dan Bappenas untuk menggali informasi terkait dengan persiapan dan pelaksanaan proyek ICWRM.

Beberapa catatan dari pertemuan dengan Dept. PU pada tanggal 13 Juni 2008, yang disampaikan oleh Bapak Hartoyo dari Dirjen Sumber Daya Air antara lain:

- ICWRM adalah proyek yang sudah cukup lama direncanakan, dan dimulai dengan pengelolaan West Tarum Canal yang studinya dilakukan oleh Bank Dunia. Proyek West Tarum Canal ini juga menjadi prioritas dari keseluruhan ICWRM. Meskipun Bank Dunia yang melakukan studi awal untuk Citarum, namun kemudian proyek ini diambil alih oleh ADB. pada pelaksanaan proyeknya ADB juga terlibat untuk wilayah Bekasi-Jatiluhur. Tujuan dari proyek ini adalah rehabilitasi sistem irigasi Jatiluhur, dan untuk supply air Jakarta. Tranche 1 proyek ICWRM sebesar \$80 juta adalah untuk perbaikan West Tarum Canal ini.
- Latar belakang proyek ICWRM ini adalah adanya beberapa permasalahan seperti: pengrusakan lingkungan (hutan dan farming system), pencemaran (domestik dan industri), dll.
- Proses penggusuran yang akan dilaksanakan adalah penggusuran di wilayah Bekasi-Krawang. Pemda Bekasi melakukan penggusuran terhadap pemukiman liar di sekitar West Tarum Canal atas dasar itikad baik pemerintah. Dimana penduduk liar tersebut mendapatkan ganti rugi sbb:
  - Permanen: 5 juta rupiah
  - Semi permanen: 3 juta rupiah
  - Darurat: 2 juta rupiah

**of Public Works**

KruHA and several other NGOs had also conducted a meeting with the representatives of Department of Public Works and Bappenas to obtain more information related with ICWRM project preparation and implementation.

Some points from the meeting with Mr. Hartoyo, Directorate General of Water Resources of Department of Public Works on 13 June 2008 are:

- ICWRM is a long-planned project and started by the West Tarum Canal rehabilitation study. The preliminary study was conducted by World Bank. The West Tarum Project has also been the priority of the whole ICWRM project. Although the World Bank conducted the preliminary study, the project was then taking over by the ADB. In the project implementation, the ADB was also involved in the Bekasi-Jatiluhur area. The goal of the project is rehabilitation of Jatiluhur water irrigation and water supply for Jakarta. Tranche 1 of ICWRM project amounted to US\$ 80 million was to rehabilitate West Tarum Canal.
- There are several problems that become the background of ICWRM project, such as environmental destruction (forest and farming system), pollution (domestic and industrial), etc.
- The resettlement process will be done in Bekasi-Kerawang area. Bekasi local government will conduct resettlement of illegal residences around West Tarum Canal. The local government will provide compensation for the illegal inhabitants as follows:
  - Permanent: 5 million rupiah
  - Semi permanent: 3 million rupiah
  - Emergency: 2 million rupiah
- Several consultation processes with the people along the Citarum had been carried out by the government. The

- Selain itu beberapa proses konsultasi dengan masyarakat di sekitar Citarum juga sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Detail peserta proses konsultasi tersebut ada di dokumen Final Report (Phase 3)-Roadmap and Program Development.
- Roadmap dibuat bersama antara pemerintah Indonesia dan ADB.
- Dalam pelaksanaan teknis di lapangannya, proyek ini melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dengan kontak Bp. Mujihadi.
- Penanggulangan permasalahan sepanjang Citarum memang sangat diperlukan, namun menurut Pak Hartoyo, pemerintah Indonesia sekarang ini sudah lebih tegas dalam menentukan sumber pendanaan sebuah proyek dimana utang tidak dijadikan alternatif utama. Jika dapat ditangani dengan APBN, maka pemerintah akan mengusahakan itu.

Beberapa catatan dari pertemuan dengan Bappenas dan beberapa stakeholder lainnya (ADB Manila dan Jakarta, NGO dari Bandung, NGO dari Jakarta, PU, BBWS, dll) pada tanggal 14 Juli 2008 yang disampaikan oleh Bapak Donny Azdan, Direktur Irigasi dan Sumber Daya Air antara lain:

- Proyek ini merupakan proyek multi-sektor maka Bappenas menerapkan output-based management, sementara perencanaan "step by step" ada di beberapa departemen terkait, seperti PU, LH dll
- Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil loan dari ADB dengan skema MFF karena skema MFF lebih longgar dari mekanisme utang biasanya, dimana jika terjadi pemutusan pinjaman sebelum proyek selain, peminjam tidak dikenakan bunga pinjaman yang belum dicairkan.
- Untuk Tranche 1 sejumlah US\$ 60 juta

detail of consultation process participants is available in Final Report document (Phase 3)-Roadmap and Program Development.

- Roadmap was made by the Government of Indonesia together with ADB.
- The project is involving *Balai Besar Wilayah Sungai Citarum* (BBWSC) in its field technical implementation. The contact person in BBWSC is Mr. Mudjiadi.
- Handling the problems along the Citarum is much needed. Mr. Hartoyo stated that the Government of Indonesia has become stricter in determining the funding source for a project and loan is not the main option. If it could be managed by the National Budget, then the Government will work on it.

Some points from the meeting with Bappenas (led by Mr. Donny Azdan, Director of Irrigation and Water Resources) and other stakeholders (ADB Manila and Jakarta office, Public Works Department, BBWS, Local NGOs and national NGOs) on 14 July 2008 are as follows:

- The project is multi-sectors project, thus Bappenas implements output based management, while "step by step" plan is conducted by the respective departments, such as Department of Public Works, Department of Environment, etc.
- The Government of Indonesia decided to take the ADB's loan with MFF scheme because it is more flexible than regular loan scheme, where there will be no interest charge for the undisbursed loan, if the loan stopped before the project finish.
- Tranche 1 amounted to US\$ 60 million was taken from OCR (Ordinary Capital



diambil dari OCR (Ordinary Capital Resources) dan ADF (Asian Development Fund) dan diprioritaskan untuk rehabilitasi Tarum Kanal Barat dan perbaikan kualitas air. Tahun 2008 adalah tahun terakhir Indonesia mendapatkan ADF sehingga pemerintah mengambil kesempatan tersebut dalam upaya rehabilitasi DAS Citarum.

- Permasalahan konflik kepentingan antara pusat dan daerah udah mulai bermunculan, dimana DPRD kabupaten ada yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan sehingga jika ada masyarakat yang bertanya DPRD tersebut seperti lepas tangan. Bappenas menanggapi bahwa hal tersebut dalam di atas dengan UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan kewenangan daerah.
- Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak industri dalam hal ini terkait dengan pencemaran wilayah DAS sejauh ini tidak dapat disentuh oleh pemerintah Indonesia. Bappenas pada saat itu tidak dapat memberikan solusi untuk menangani hal tersebut dengan alasan bukan wilayah kerja Bappenas.
- Permasalahan keterbukaan informasi terkait dengan manajemen utang negara yang sampai saat ini belum dapat diakses oleh masyarakat, Bappenas berupaya untuk memperbaiki sistem demi tercapainya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu Pak Donny menyatakan bahwa manajemen utang sekarang jauh lebih baik daripada manajemen APBN sehingga perlu juga dicermati proses pembuatan APBN.

**d. Kunjungan Lapangan ke Tarum Kanal Barat**

Dalam rangka mendapatkan fakta kondisi terakhir di wilayah Tarum Kanal Barat, KRuHA bersama dengan BIC melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Karawang pada tanggal 8 Juli 2008 dan melakukan

Resources) and ADF (Asian Development Fund). It was prioritized for the rehabilitation of West Tarum Canal and the improvement of water quality. The year 2008 will be the last year for Indonesia to receive ADF, therefore the government will take this opportunity in order to rehabilitate the Citarum's river basin.

- The conflict of interest issue between the central and local government has started to occur. Some of the local parliament members felt that they were not been involved in the planning process, thus when the people asked them about the issue, they seemed to take no responsibility on the issue. Bappenas commented that the issue has been managed by Law No. 32 concerning local authority.
- So far, violations done by the Industries along Citarum's river basin area cannot be managed by the Government of Indonesia. Bappenas cannot give any solution to handle this problem with the excuse that it is not Bappenas area of work.
- In terms of information disclosure regarding debt management that could not be accessed by the people, Bappenas said that they are trying to improve the system in order to be transparent and accountable government. Mr. Donny added that the recent debt management is better than the national budget management; therefore National Budget should also be monitored.

**d. Field Visit to West Tarum Canal**

To obtain the latest condition of West Tarum Canal area, KruHA and BIC had conducted a field visit in Karawang area on July 8, 2008 and conducted several interviews with the local people. The result are:

- There are many illegal inhabitants in

wawancara dengan masyarakat setempat.

Hasil yang didapat antara lain:

- Di sebagian wilayah terdapat beberapa pemukim liar yang artinya mereka tinggal di tanah milik Departemen PU dan mereka diwajibkan membayar pajak bangunan. Selain itu sejak awal mereka tinggal di wilayah tersebut, telah dibuat kesepakatan bahwa jika terjadi pelebaran sungai, maka masyarakat tersebut siap dan bersedia untuk pindah. Menurut salah satu pemukim liar tersebut, pelebaran sebesar 8 meter dan penggusuran akan dilaksanakan mulai tahun 2009.
- Masyarakat sepanjang sungai tidak dapat menggunakan air sungai untuk diminum. Mereka hanya dapat menggunakannya untuk keperluan Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Untuk minum mereka menggunakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- Sebagian besar pencemaran dilakukan oleh pihak industri yang berlokasi di sepanjang aliran sungai. Industri tersebut seperti jual besi tua dan plastik bekas. Mereka menggunakan air sungai untuk membersihkan besi tua dan plastik tersebut sebelum dijual ulang.
- Mata pencaharian masyarakat setempat antara lain sebagai buruh tani dan tukang ojek. Mereka tidak memiliki lahan pertanian karena sudah dijual kepada pemilik pabrik di sekitar aliran sungai, jadi mereka hanya sebagai buruh tani.

#### **V. Hal-hal yang perlu diingat**

Penilaian proyek : 4-8 Agustus 2008

Persetujuan proyek : 4 November 2008

Kategori Safeguards :

- Dampak Lingkungan : B
- Penggusuran sepihak : A
- Masyarakat adat : C

most of the area. It means they are living in land owned by the Department of Public Works. They have to pay the building tax. Since the first time they live in that area, they had made an agreement. They are willing to move if the Department of public works wants to expand the river. According to one of the illegal inhabitant, the 8 meters expansion and resettlement will be started on 2009.

- The people who live along the Citarum River could not use the water for drinking. They only use the water for bath, wash and toilet. They use bottled water for drinking.
- Most of the pollution is done by industries located along the river basin. They use the river to clean up scrap iron and used plastic before they sell again.
- Many local people in this area are working as peasant and *ojek* driver (motorbike driver). They do not have land because they had sold it to the factories' owner.

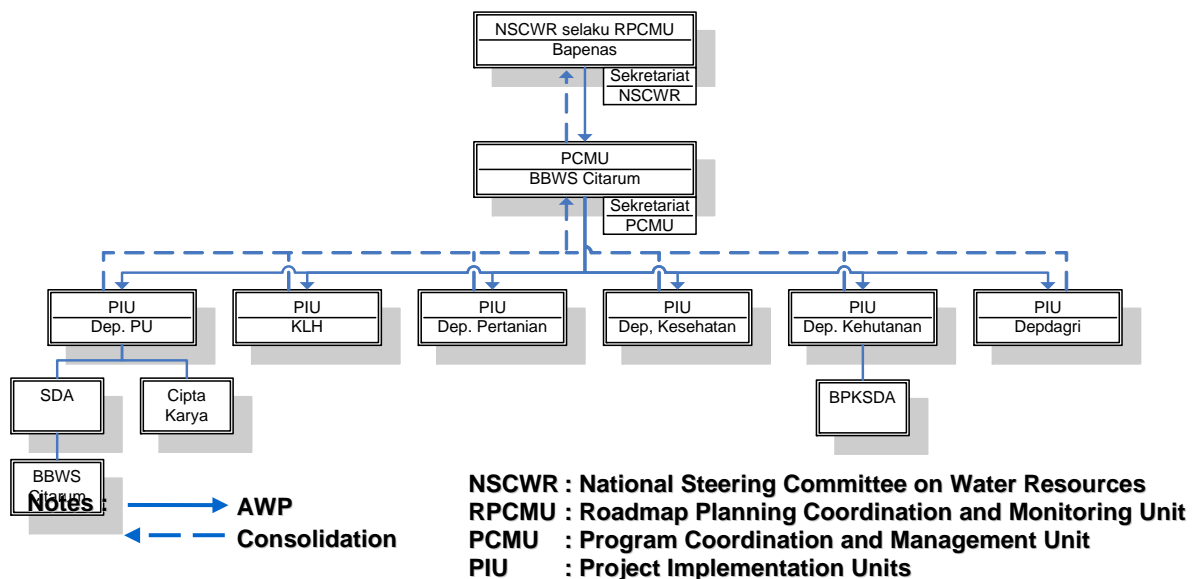
#### **V. Things to remember**

Project Appraisal: 4-8 August 2008

Project Approval: 4 November 2008

Safeguards Category:

- Environmental Impact: B
- Involuntarily Resettlement: A
- Indigenous People: C



### ICWRMP Management Structure

#### References:

ADB's website (<http://www.adb.org/projects/summaries.asp?browse=1&type=&query=Citarum>)

Catatan pertemuan dengan Bappenas pada tanggal 14 Juli 2008

Catatan pertemuan dengan Departemen Pekerjaan Umum pada tanggal 13 Juni 2008

[Environmental Assessment and Review Framework \(EARF\)-MFF: Integrated Citarum Water Resources Management](#) (Supplementary Appendixes)

[Integrated Water Resources Management Program](#) (Environment-related Documents)

[Integrated Water Resources Management Program](#) (Environment-related Documents)

[Integrated Citarum Water Resources Management Project \(Financed by the Technical Assistance Special Fund\)](#) (Consultants' Reports)

Pikiran Rakyat, 2003, <http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/Sept/kr-080903.htm>

[Preparing the Integrated Citarum Water Resources Management Project](#) (Technical Assistance Reports)

[Strategic Environmental Assessment \(SEA\) for MFF-Integrated Citarum Water Resources Management](#) (Supplementary Appendixes)

<sup>i</sup> Campaign Coordinator of KRuHA (People's Coalition for Right to Water)